**PENDIDIKAN DI PERSIMPANGAN: MEMBANGUN AKSES DAN KUALITAS DI TENGAH KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA**

Dimas Sa’dul Holqi1 , Feby Arma Putra2, Nafiz Annas3

1 Mahasiswa Prodi Bisnis dan Manajemen Ritel, Politeknik PGRI Banten

2 Manajemen SDM Sektor Publik, Politeknik PGRI Banten

3 Bisnis dan Manajemen Ritel, Politeknik PGRI Banten

[Dimasdimas44555@gmail.com1](mailto:Dimasdimas44555@gmail.com1), feby@politeknikpgribanten.ac.id2

***Abstract***

*Education plays a crucial role in the development of a nation, both in social, economic, and political aspects. However, in Indonesia, the challenge of low educational quality, especially in remote areas, remains a serious issue that affects various sectors of life. This article aims to analyze the factors contributing to the low quality of education in Indonesia, including access inequality, low teacher quality, irrelevant curricula, and the impact of socioeconomic factors. The method used is a literature review, analyzing various academic sources from journals, government reports, and data from international organizations. The findings indicate that more inclusive educational policies, equitable teacher distribution, and adaptive curriculum revisions are essential to improving the quality of education in Indonesia. The government and various stakeholders must collaborate to create a more equitable and high-quality education system.*

*Keywords: education, teacher quality, curriculum, social inequality, Indonesia.*

**Abstrak**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, di Indonesia, tantangan rendahnya kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, masih menjadi isu serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk ketimpangan akses, rendahnya kualitas guru, kurikulum yang tidak relevan, serta pengaruh faktor sosial ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah dari jurnal, laporan pemerintah, serta data dari organisasi internasional. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, distribusi guru yang lebih merata, serta revisi kurikulum yang adaptif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

**Kata kunci**: pendidikan, kualitas guru, kurikulum, ketimpangan sosial, Indonesia

**Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik. Menurut Hidayat dan Dewi (2022), pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap individu agar dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pendidikan juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan memfasilitasi mobilitas sosial (Wijaya, 2023).

Di Indonesia, rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi salah satu tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Hal ini tercermin dari kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang secara langsung memengaruhi angka melek huruf dan keterampilan dasar. Menurut laporan UNESCO (2020), wilayah-wilayah terpencil di Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan, mulai dari kekurangan sekolah hingga minimnya tenaga pengajar berkualitas. Ketidaksetaraan ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana daerah dengan akses pendidikan yang terbatas cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Fitriyah & Wardani, 2022).

Pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, perubahan ekonomi, dan dinamika sosial tidak dapat diabaikan (Putra & Suseno, 2022). Tanpa pendidikan yang memadai, individu akan kesulitan bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi. Pendidikan berperan dalam membentuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan di era modern ini (Mobonggi & Hakeu, 2023). Namun, kurikulum di Indonesia sering dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Kurikulum yang terlalu teoritis dan minim praktik membuat lulusan sekolah kurang siap menghadapi tuntutan pasar kerja global (Afandi, 2011).

Masalah lain yang signifikan dalam pendidikan Indonesia adalah kualitas guru. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, belum memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini diperparah oleh kurangnya program pelatihan berkelanjutan yang dapat membantu guru untuk terus meningkatkan kemampuannya sesuai perkembangan zaman (Saragih, 2017). Sebuah penelitian oleh Wijaya (2023) menyoroti bahwa kualitas guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, dan peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Selain itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga sangat penting. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, implementasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya masih menjadi kendala utama. Menurut Tilaar (2009), banyak kebijakan pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dan kurang memperhatikan kebutuhan spesifik di lapangan, seperti ketimpangan akses dan distribusi sumber daya pendidikan di daerah terpencil.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, seperti akses yang terbatas, kualitas guru yang tidak merata, kurikulum yang tidak relevan, serta faktor sosial ekonomi. Selain itu, artikel ini juga menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi masalah ini.

**LANDASAN TEORI**

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Schultz (1961) dalam teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam sumber daya manusia yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja. Pendidikan yang berkualitas mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh Todaro dan Smith (2012), yang menekankan bahwa pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk bekerja lebih efektif dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta politik, sehingga berperan penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Di Indonesia, rendahnya kualitas pendidikan terkait dengan sejumlah faktor, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, terbatasnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta rendahnya alokasi anggaran pendidikan (World Bank, 2013). Selain itu, kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern juga menjadi kendala utama. Menurut Becker (1964), pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan ekonomi, agar lulusan dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional. Namun, di Indonesia, kurikulum cenderung lebih berfokus pada hafalan teori dan kurang memberikan ruang untuk pengembangan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi partisipasi dalam pendidikan. Lewis (1959) mengemukakan bahwa rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat miskin menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, di mana akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan layak sangat terbatas. Di Indonesia, latar belakang ekonomi keluarga berperan besar dalam menentukan peluang pendidikan anak. Coleman (1966) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, yang memperburuk ketimpangan sosial dan memperlebar jurang antara kelompok ekonomi di masyarakat.

**Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau literature review. Metode ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber ilmiah yang telah diakui, seperti buku, artikel jurnal akademik, laporan resmi, serta kebijakan pendidikan nasional dan internasional. Dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi akar masalah pendidikan di Indonesia dan mengusulkan solusi berdasarkan tinjauan teoretis dan empiris.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang terpercaya, termasuk buku-buku yang membahas teori pendidikan, ketimpangan pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, artikel ilmiah dan jurnal dari penelitian sebelumnya yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir juga menjadi referensi utama untuk memastikan relevansi data dengan kondisi terkini pendidikan di Indonesia. Laporan resmi dari pemerintah Indonesia, seperti dari Kementerian Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta lembaga internasional seperti UNESCO dan UNICEF, turut digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam sektor pendidikan. Dokumen undang-undang dan kebijakan pendidikan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga dianalisis untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai regulasi pendidikan di negara ini.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan sumber-sumber yang telah melewati proses peer review dan diakui secara akademis. Selain itu, laporan dari lembaga internasional seperti UNESCO serta data resmi dari pemerintah Indonesia digunakan sebagai referensi utama untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi yang dianalisis. Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis dan disesuaikan dengan konteks permasalahan pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan sintesis yang mendalam dan tepat guna.

**Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di indonesia. Faktor-faktor ini mencangkup aspek internal dari sistem pendidikan itu sendiri, serta faktor ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai setiap faktor:

**Kesenjangan Pendidikan di Indonesia**

Berdasarkan hasil studi pustaka, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia menjadi salah satu tantangan paling serius yang dihadapi negara ini. Terdapat perbedaan signifikan dalam hal infrastruktur, fasilitas, dan tenaga pengajar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut laporan UNESCO (2020), wilayah-wilayah terpencil masih kekurangan sekolah-sekolah dengan fasilitas yang layak, seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet yang memadai. Selain itu, tenaga pengajar yang berkualitas di daerah-daerah tersebut sangat terbatas. Kesenjangan geografis ini menyebabkan tidak meratanya kesempatan pendidikan, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kesenjangan dalam akses pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran tetapi juga pada daya saing individu di masa depan. Daerah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas cenderung menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang lebih rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja. Ketimpangan ini memperkuat teori *modal budaya* Bourdieu (1977), di mana anak-anak dari keluarga kaya atau yang tinggal di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas. Dengan demikian, pemerintah perlu memperluas infrastruktur pendidikan secara merata serta memastikan bahwa daerah-daerah terpencil mendapatkan akses yang setara dengan daerah perkotaan.

**Kualitas Pengajaran dan Guru**

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia sangat bervariasi. Menurut Saragih (2017), guru-guru yang lebih berkualitas cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara banyak guru di daerah terpencil belum memiliki kualifikasi yang memadai. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada guru sering kali tidak mengikuti perkembangan kurikulum dan kebutuhan zaman, sehingga metode pengajaran yang digunakan masih tradisional dan kurang efektif dalam membangun pemahaman kritis pada siswa.

Kualitas guru sangat mempengaruhi proses belajar-mengajar. Shulman (1987) menekankan pentingnya pengetahuan pedagogis yang kuat agar guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Di Indonesia, kurangnya pelatihan lanjutan untuk guru serta minimnya insentif untuk pengembangan profesional menjadi masalah besar. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan kurikulum dan teknologi. Distribusi guru berkualitas juga harus diperbaiki agar tidak hanya terpusat di perkotaan.

**Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman**

Kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum yang diterapkan lebih berfokus pada hafalan dan pembelajaran teori, sementara pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah masih minim. Becker (1964) dalam teori human capital menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi agar individu dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Kurikulum yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman merupakan salah satu penghambat utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Di era digital saat ini, dunia kerja menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teori tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan teknologi. Oleh karena itu, revisi kurikulum yang lebih mengedepankan pembelajaran berbasis kompetensi dan teknologi sangat diperlukan. Pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi digital dan internet juga penting untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan global.

**Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi**

Faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi partisipasi dan kesuksesan dalam pendidikan. Menurut Coleman (1966), latar belakang ekonomi keluarga memainkan peran penting dalam menentukan akses anak terhadap pendidikan. Di Indonesia, anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah sering kali terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga. Faktor ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi di mana keluarga miskin cenderung tetap dalam kemiskinan karena rendahnya akses terhadap pendidikan.

Kemiskinan merupakan penghalang besar bagi banyak keluarga untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Meski pemerintah telah meluncurkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan. Program ini harus diiringi dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif, seperti beasiswa penuh bagi siswa dari keluarga miskin, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga agar mereka tidak harus memilih antara pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini penting untuk memutus rantai kemiskinan dan memastikan partisipasi pendidikan yang lebih inklusif.

**Peran Pemerintah dan Kebijakan Pendidikan**

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan dan memfasilitasi program pemerataan guru. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Tilaar (2009) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Selain itu, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh masalah birokrasi dan korupsi.

Peran pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan sangat krusial. Namun, kebijakan pendidikan yang hanya berfokus pada target jangka pendek tanpa adanya pengawasan yang ketat cenderung tidak efektif. Reformasi pendidikan yang lebih mendasar dan berkelanjutan diperlukan agar kebijakan yang ada dapat diterapkan dengan optimal. Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tepat sasaran, dan distribusi sumber daya pendidikan harus merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil.

**Simpulan Dan Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kesenjangan akses pendidikan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin, menjadi salah satu faktor yang memperburuk kualitas pendidikan. Kedua, kualitas guru yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menyebabkan efektivitas proses belajar mengajar menjadi rendah. Ketiga, kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital dan tuntutan dunia kerja global, mengakibatkan lulusan sekolah di Indonesia kurang kompetitif. Keempat, faktor sosial ekonomi menjadi penghalang utama bagi banyak anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kelima, peran pemerintah yang belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, terutama dalam hal distribusi sumber daya dan pengawasan, turut memperburuk situasi pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya berdampak pada rendahnya daya saing bangsa, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil serta memperluas akses teknologi pendidikan seperti internet dan media pembelajaran berbasis digital. Pembangunan sekolah baru di wilayah yang belum terjangkau serta peningkatan fasilitas pendidikan perlu dilakukan untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses yang setara. Kedua, peningkatan kualitas dan distribusi guru menjadi penting. Pemerintah harus lebih serius dalam memastikan distribusi guru berkualitas di seluruh pelosok negeri, terutama di daerah terpencil. Selain itu, program pelatihan guru harus lebih ditingkatkan untuk memastikan para guru memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan kurikulum dan teknologi.

Ketiga, revisi kurikulum diperlukan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum yang berbasis kompetensi, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas harus diterapkan secara lebih menyeluruh. Keempat, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan sosial ekonomi melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan yang lebih komprehensif, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kelima, kebijakan pendidikan harus berfokus pada keberlanjutan dan pengawasan yang ketat, dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan. Hal ini penting agar program-program pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, R. (2011). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 85-98.

Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (1977). Cultural reproduction and social reproduction. In J. Karabel & A. H. Halsey (Eds.), *Power and Ideology in Education* (pp. 487-510). New York: Oxford University Press.

Coleman, J. S. (1966). Equality of educational opportunity (*Coleman Report*). Washington D.C.: U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P. (2022). Paradigma kurikulum merdeka bagi guru sekolah dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 236-243.

Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.

Lewis, O. (1959). Five families: *Mexican case studies in the culture of poverty*. New York: Basic Books.

Mobonggi, A., & Hakeu, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Damhil Education Journal*, 3(2), 73-84.

Putra, F. A., & Suseno, B. D. (2022). Industrial Revolution 4.0 as a Strategic Issue of Higher Education. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *10*(2), 3045-3051.

Saragih, E. (2017). Pendidikan di daerah terpencil: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(2), 103-115.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-22.

Tilaar, H. A. R. (2009). *Membedah Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Addison-Wesley.

UNESCO. (2017). *Global Education Monitoring Report 2017/18: Accountability in Education*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education*. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

Wijaya, L. (2023). Peran guru profesional untuk meningkatkan standar kompetensi pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1222-1230.

World Bank. (2013). *Indonesia’s Education Sector Review: Performance and Challenges*. Washington, DC: World Bank.